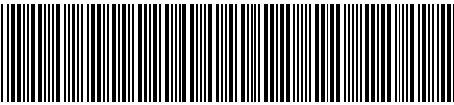




SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : SP DIPA- 005.03.2.403435/2025



DS:6274-0566-5030-3039

A. Dasar Hukum:

- 1.UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- 2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- 3.UU No. 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025

B.Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

- 1. Kementerian Negara/Lembaga : (005) MAHKAMAH AGUNG
- 2. Unit Organisasi : (03) Ditjen Badan Peradilan Umum
- 3. Provinsi : (28) MALUKU UTARA
- 4. Kode>Nama Satker : (403435) PENGADILAN NEGERI BOBONG
- Sebesar : Rp. 88.163.000 (DELAPAN PULUH DELAPAN JUTA SERATUS ENAM PULUH TIGA RIBU RUPIAH)

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

- 03 KETERTIBAN DAN KEAMANAN
- 03.04 PERADILAN

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

- 005.03.BF Program Penegakan dan Pelayanan Hukum
- 005.03.BF.1049 Peningkatan Manajemen Peradilan Umum

Jumlah Uang

Rp. 88.163.000
Rp. 88.163.000

C. Sumber Dana Berasal Dari :

- | | | | | | |
|-------------------------------|-----|------------|--------------------------------|-----|---|
| 1. Rupiah Murni | Rp. | 88.163.000 | 4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri | Rp. | 0 |
| 2. PNB | | | - Pinjaman Dalam Negeri | Rp. | 0 |
| PNBP | | | - Hibah Dalam Negeri | Rp. | 0 |
| PNBP TA Berjalan | Rp. | 0 | 5. Hibah Langsung | Rp. | 0 |
| 3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri | Rp. | 0 | - Hibah Luar Negeri Langsung | Rp. | 0 |
| - Pinjaman Luar Negeri | Rp. | 0 | - Hibah Dalam Negeri Langsung | Rp. | 0 |
| - Hibah Luar Negeri | Rp. | 0 | 6. SBSN PBS | Rp. | 0 |

D. Pencairan dana dilakukan melalui :

- 1. KPPN T E R N A T E (062) Rp. 88.163.000

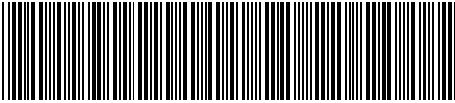
E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)

- 1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
- 2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
- 3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
- 4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
- 5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
- 6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
- 7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.

Jakarta, 02 Desember 2024
A.N. MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

ttd.
ISA RACHMATARWATA
NIP. 196612301991021001

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 005.03.2.403435/2025
I A. INFORMASI KINERJA



DS:6274-0566-5030-3039

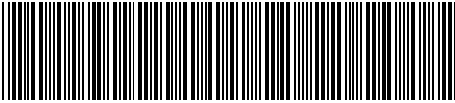
Kementerian Negara/Lembaga : (005) MAHKAMAH AGUNG
Unit Organisasi : (03) Ditjen Badan Peradilan Umum
Provinsi : (28) MALUKU UTARA
Kode>Nama Satker : (403435) PENGADILAN NEGERI BOBONG

Program	:	005.03.BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum				88.163.000
Kegiatan	:	1049	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum				88.163.000
Indikator Kinerja Kegiatan	:	1. 01	Jumlah layanan Pos Bantuan Hukum di lingkungan Peradilan Umum				
		2. 01	Jumlah perkara peradilan umum yang diselesaikan di tingkat pertama dan tingkat banding tepat waktu				
		3. 01	Monitoring putusan yang ditindaklanjuti (eksekusi) di Lingkungan Peradilan Umum				
		4. 02	Jumlah Perkara Peradilan Umum yang diselesaikan melalui Pembebasan Biaya Perkara				
		5. 03	Jumlah Perkara yang di selesaikan melalui Sidang diluar Gedung Pengadilan				
Klasifikasi Rincian Output 1	:	1049.AEA	Koordinasi	2,00	kegiatan		44.540.000
Rincian Output	:	01 AEA.001	Pembinaan dan Pengawasan Aparatur Tenaga Teknis di Lingkungan Peradilan Umum	2.00	kegiatan		44.540.000
Klasifikasi Rincian Output 2	:	1049.BCA	Perkara Hukum Perseorangan	25,00	Perkara, Berkas Perkara		18.903.000
Rincian Output	:	01 BCA.U13	Perkara Pidana yang Diselesaikan Ditingkat Pertama di Wilayah Timur	25.00	Perkara		18.903.000
Klasifikasi Rincian Output 3	:	1049.QBA	Layanan Bantuan Hukum Perseorangan	17,00	Orang		24.000.000
Rincian Output	:	01 QBA.032	Layanan Pos Bantuan Hukum di lingkungan Peradilan Umum (PN)	17.00	Orang		24.000.000
Klasifikasi Rincian Output 4	:	1049.QCA	Perkara Hukum Perseorangan	2,00	Perkara, Berkas Perkara		720.000
Rincian Output	:	01 QCA.002	Sidang di luar Gedung Pengadilan (PN)	2.00	Perkara		720.000

Jakarta, 02 Desember 2024
Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum

ttd.
H. Bambang Myanto, S.H., M.H.
NIP. 196805231992121002

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 005.03.2.403435/2025
I B. SUMBER DANA



DS:6274-0566-5030-3039

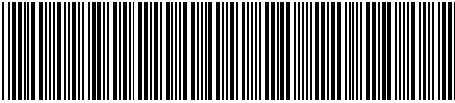
Kementerian Negara/Lembaga : (005) MAHKAMAH AGUNG
Unit Organisasi : (03) Ditjen Badan Peradilan Umum
Provinsi : (28) MALUKU UTARA
Kode>Nama Satker : (403435) PENGADILAN NEGERI BOBONG

			Pagu		Ekuivalen Rupiah	
1. Anggaran Tahun 2025	Rp.	88.163.000	Ket :	a. Pinjaman Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$	0 Rp.
1. Rupiah Murni	Rp.	88.163.000		(2) RPLN	US\$	0 Rp.
2. PNPB	Rp.	0		b. Hibah Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$	0 Rp.
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0		(2) RHLN	US\$	0 Rp.
4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0		c. Pinjaman Dalam Negeri	IDR	0
5. Hibah Langsung	Rp.	0		d. Hibah Dalam Negeri	IDR	0
6. SBSN PBS	Rp.	0		e. Hibah Luar Negeri Langsung	IDR	0
2. Rincian Pinjaman / Hibah :				f. Hibah Dalam Negeri Langsung	IDR	0

(dalam ribuan rupiah)

No.	SUMBER PINJAMAN DAN HIBAH No. NPP/H per Tahun No. Register		PAGU TAHUN INI		RINCIAN DANA BERDASARKAN CARA PENARIKAN		DANA PENDAMPING		
	Kode	Uraian	Kode	Dana	Kode	Dana	Rp. Pdp	Rp.LN	Rp.Loc.Cost
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 005.03.2.403435/2025
II. RINCIAN PENGELUARAN



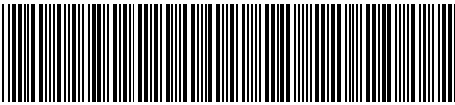
DS:6274-0566-5030-3039

Kementerian Negara/Lembaga : (005) MAHKAMAH AGUNG
Unit Organisasi : (03) Ditjen Badan Peradilan Umum
Provinsi : (28) MALUKU UTARA
Kode>Nama Satker : (403435) PENGADILAN NEGERI BOBONG
Kewenangan : (KD)

Halaman : II. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
403435	PENGADILAN NEGERI BOBONG	-	88.163	-	-	-	88.163	28 . 09	
005.03.BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	-	88.163	-	-	-	88.163		
1049	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	-	88.163	-	-	-	88.163		
1049.AEA	Koordinasi (28.09 MALUKU UTARA / KAB. PULAU TALIABU)	-	44.540	-	-	-	44.540		
01	RM	-	44.540	-	-	-	44.540		
1049.BCA	Perkara Hukum Perseorangan (28.09 MALUKU UTARA / KAB. PULAU TALIABU)	-	18.903	-	-	-	18.903		
01	RM	-	18.903	-	-	-	18.903		
1049.QBA	Layanan Bantuan Hukum Perseorangan (28.09 MALUKU UTARA / KAB. PULAU TALIABU)	-	24.000	-	-	-	24.000		
01	RM	-	24.000	-	-	-	24.000		
1049.QCA	Perkara Hukum Perseorangan (28.09 MALUKU UTARA / KAB. PULAU TALIABU)	-	720	-	-	-	720		

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 005.03.2.403435/2025
II. RINCIAN PENGELUARAN



DS:6274-0566-5030-3039

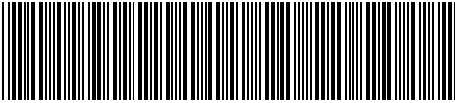
Kementerian Negara/Lembaga : (005) MAHKAMAH AGUNG
Unit Organisasi : (03) Ditjen Badan Peradilan Umum
Provinsi : (28) MALUKU UTARA
Kode>Nama Satker : (403435) PENGADILAN NEGERI BOBONG
Kewenangan : (KD)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51] 3	BARANG [52] 4	MODAL [53] 5	BANTUAN SOSIAL [57] 6	LAIN-LAIN [58] 7	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01 RM		-	720	-	-	-	720	062@	
JUMLAH		-	88.163	-	-	-	88.163		

Jakarta, 02 Desember 2024
Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum

ttd.
H. Bambang Myanto, S.H., M.H.
NIP. 196805231992121002

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 005.03.2.403435/2025
III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN



DS:6274-0566-5030-3039

Kementerian Negara/Lembaga : (005) MAHKAMAH AGUNG
Unit Organisasi : (03) Ditjen Badan Peradilan Umum
Provinsi : (28) MALUKU UTARA
Kode>Nama Satker : (403435) PENGADILAN NEGERI BOBONG

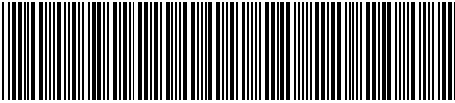
Halaman : III. 1
(dalam ribuan rupiah)

NO	KODE	URAIAN SATKER	RENCANA PENARIKAN												JUMLAH SELURUH
			JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	403435	PENGADILAN NEGERI BOBONG													
		RENCANA PENARIKAN DANA	3.771	10.171	4.971	9.371	4.971	9.371	4.971	9.521	5.271	10.221	5.171	10.382	88.163
		BELANJA BARANG	3.771	10.171	4.971	9.371	4.971	9.371	4.971	9.521	5.271	10.221	5.171	10.382	88.163
		Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	3.771	10.171	4.971	9.371	4.971	9.371	4.971	9.521	5.271	10.221	5.171	10.382	88.163
		52 BELANJA BARANG DAN BARANG	3.771	10.171	4.971	9.371	4.971	9.371	4.971	9.521	5.271	10.221	5.171	10.382	88.163
		PERKIRAAN PENERIMAAN	330	330	330	330	330	330	330	330	330	330	330	346	3.976
		- PNBP (425231)	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	15	70
		- PNBP (425233)	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60
		- PNBP (425239)	320	320	320	320	320	320	320	320	320	320	320	320	326
005.03.BF.1049															

Jakarta, 02 Desember 2024
Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum

ttd.
H. Bambang Myanto, S.H., M.H.
NIP. 196805231992121002

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 005.03.2.403435/2025
IV A. B L O K I R



DS:6274-0566-5030-3039

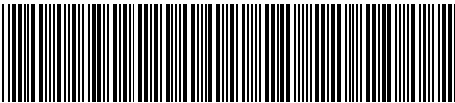
Kementerian Negara/Lembaga : [005] MAHKAMAH AGUNG
Unit Organisasi : [03] Ditjen Badan Peradilan Umum
Provinsi : [28] MALUKU UTARA
Kode dan Nama Satker : [403435] PENGADILAN NEGERI BOBONG

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN
403435	PENGADILAN NEGERI BOBONG Jumlah Dana yang tidak dapat dicairkan Rp. 11.930 52 Belanja Barang Rp. 11.930		
005.03.BF 1049	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum Peningkatan Manajemen Peradilan Umum		
1049.AEA	Koordinasi 524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 10.270 Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024 Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		
1049.BCA	Perkara Hukum Perseorangan 524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 1.300 Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024 Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		
1049.QCA	Perkara Hukum Perseorangan 524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 360 Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024 Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		

Jakarta, 02 Desember 2024
Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum

ttd.
H. Bambang Myanto, S.H., M.H.
NIP. 196805231992121002

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 005.03.2.403435/2025
IV B. C A T A T A N



DS:6274-0566-5030-3039

Kementerian Negara/Lembaga : [005] MAHKAMAH AGUNG
Unit Organisasi : [03] Ditjen Badan Peradilan Umum
Provinsi : [28] MALUKU UTARA
Kode dan Nama Satker : [403435] PENGADILAN NEGERI BOBONG

Halaman : IV.B. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 02 Desember 2024
Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum

ttd.
H. Bambang Myanto, S.H., M.H.
NIP. 196805231992121002